

KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM PENANGGULANGAN *DESTRUCTIVE FISHING* PADA REZIM PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

¹Alvin Favian Tamera, ²Dandy Nur Syah Putra

¹Fakultas Hukum, Universitas Pamulang

²Fakultas Hukum, Universitas Pamulang

E-mail: ¹alfatrx11@gmail.com , ²dandybonges050900@gmail.com

ABSTRAK

Kebijakan hukum pidana dalam penanggulangan tindak pidana destructive fishing saat ini bersifat *primum remedium*. Namun dalam perkembangannya kebijakan hukum pidana dalam menanggulangi destructive fishing mengalami beberapa hambatan dan belum selaras dengan konsep pembangunan berkelanjutan. Mengingat pembangunan berkelanjutan merupakan salah satu asas dalam pengelolaan perikanan, maka perlu dilakukan penyesuaian antara kebijakan hukum pidana dengan pembangunan berkelanjutan. Oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis kebijakan ideal hukum pidana dalam penanggulangan destructive fishing pada rezim pembangunan berkelanjutan. Penelitian ini merupakan penelitian hukum doktrinal dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan analitis, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan ideal hukum pidana dalam penanggulangan destructive fishing pada rezim pembangunan berkelanjutan yakni dengan melakukan pengaturan terhadap sanksi tindakan yang mengarah pada perbaikan sosial, ekonomi dan perbaikan kerusakan sumber daya ikan dan ekosistemnya akibat praktik destructive fishing. Sanksi tindakan lebih bersifat restoratif, antisipatif, dan mendidik sehingga dapat mengurangi degradasi sumber daya ikan dan lingkungan. Dengan demikian, keseimbangan antara pemanfaatan sumber daya ikan dan pembangunan berkelanjutan dapat terwujud.

Kata Kunci : Destructive Fishing, Hukum Pidana, Pembangunan Berkelanjutan

ABSTRACT

The criminal law policy in dealing with destructive fishing is currently primum remedium. However, in its development the criminal law policy in overcoming destructive fishing experiences several obstacles and is not yet in line with the concept of sustainable development. Considering that sustainable development is one of the principles in fisheries management, it is necessary to make adjustments between criminal law policies and sustainable development. Therefore this research aims to study and analyze the ideal criminal law policy in overcoming destructive fishing in the sustainable development regime. This research is a doctrinal law research using a statutory approach, analytical approach, conceptual approach, and case approach. The results showed that the ideal policy of criminal law in overcoming destructive fishing in sustainable development regimes is to make arrangements for sanctions actions that lead to social, economic improvement and repair damage to fish resources and their ecosystems due to destructive fishing practices. Sanctions for actions are more restorative, anticipatory, and educational so that they can reduce the degradation of fish resources and the environment. Thus, the balance between the use of fish resources and sustainable development can be realized.

Keyword : Destructive Fishing, Criminal Law, Sustainable Development

PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Potensi perikanan Indonesia diperkirakan mencapai 6,4 juta Ton pertahun yang tersebar di seluruh wilayah perairan Indonesia.¹⁴⁸ Hal inilah yang menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara penghasil ikan terbesar di dunia.¹⁴⁹ Potensi perikanan yang besar ini dapat menjadi sumber penghasilan bagi masyarakat yang bermukim di wilayah pesisir yang sebagian besar berprofesi sebagai nelayan.¹⁵⁰ Oleh karena itu, pemerintah harus membuat

¹⁴⁸ Hari Eko Irianto, *et al*, “Dukungan Teknologi Penyediaan Produk Perikanan”, *Makalah*, Seminar Nasional Hari Pangan Sedunia 2007 di Auditorium II Kampus Penelitian Pertanian Cimanggu, Bogor, 21 November 2007, hlm.1

¹⁴⁹ CEA, *Trend in Marine Resources and Fisheries Management in Indonesia*, California: California Environmental Associates, 2018, hlm. 9.

¹⁵⁰ Ayu Izza Elvany, “Kebijakan Formulatif Penanggulangan Tindak Pidana *Destructive Fishing* di Indonesia”, *Justitia Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 3, No. 2, Oktober 2019, hlm. 212.

kebijakan untuk melindungi potensi perikanan Indonesia agar dapat mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Namun realitanya tindak pidana perikanan (*illegal fishing*) masih sering terjadi, salah satunya praktik menangkap ikan dengan cara yang merusak (*destructive fishing*). Pada Tahun 2019 terdapat 33 kasus *destructive fishing*, 11 diantaranya ditangani oleh Direktorat Jenderal PSDKP Kementerian Kelautan dan Perikanan sedangkan 21 kasus ditangani oleh Kepolisian Republik Indonesia.¹⁵¹

Pemerintah Indonesia telah melakukan berbagai upaya untuk melindungi potensi perikanan, salah satunya melakukan kriminalisasi terhadap tindakan *destructive fishing*. Sanksi pidana terhadap pelaku *destructive fishing* diatur dalam Pasal 84 dan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (selanjutnya disebut UU Perikanan). Sanksi pidana dalam UU Perikanan merupakan satu-satunya sanksi yang dapat dikenakan kepada pelaku *destructive fishing*. UU Perikanan belum mengatur sanksi alternatif lain bagi pelaku *destructive fishing*. Dengan demikian, sanksi pidana dirumuskan sebagai sanksi yang utama (*primum remedium*) bagi pelaku *destructive fishing*.

Perumusan sanksi pidana sebagai *primum remedium* dalam perkembangannya mengalami beberapa kendala dalam aplikasi dan eksekusinya. Disatu sisi sanksi pidana akan memberikan efek jera bagi pelaku *destructive fishing*, namun disisi lain perumusan sanksi pidana sebagai *primum remedium* tidak dapat diterapkan secara maksimal karena dibatasi oleh ketentuan instrumen hukum internasional.¹⁵² Berdasarkan ketentuan *United Nations Convention on the Law of the Sea* (selanjutnya disebut UNCLOS), sanksi pidana penjara terhadap pelaku *destructive fishing* di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) hanya berlaku bagi pelaku yang berkewarganegaraan Indonesia, sedangkan terhadap warga negara asing yang melakukan kejahatan di ZEEI tidak dapat dikenakan pidana penjara.¹⁵³ Selanjutnya untuk pidana denda walaupun nominalnya relatif besar, namun belum ada kebijakan yang mengatur tentang cara mengeksekusi putusan denda tersebut.¹⁵⁴ Menurut ketentuan Pasal 30 KUHP, apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan

¹⁵¹ Ayu Izza Elvany, "Kebijakan Formulatif Penanggulangan Tindak Pidana *Destructive Fishing* di Indonesia", *Justitia Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 3, No. 2, Oktober 2019, hlm. 213.

¹⁵² Blake D. Ratner, "Fishing for Justice: Human Rights, Development, and Fisheries Sector Reform", *Global Environmental Change*, Vol. 27, 2014, hlm. 121.

¹⁵³ Maroni, *Politik Hukum Penanggulangan Kejahatan di Bidang Perikanan*, Bandar Lampung: AURA, 2019, hlm. 101.

¹⁵⁴ Tatik Sunatri, *et al.*, *Optimalisasi Pelaksanaan Eksekusi Pidana Denda Dikaitkan Pasal 102 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan*, Jakarta: MISWAR2017, hlm. 45.

maksimal enam bulan. Sedangkan penjatuhan pidana denda pada pelaku tindak pidana perikanan tidak dapat disertai dengan pidana pengganti berupa kurungan, sehingga membuka peluang bagi narapidana untuk tidak membayar denda dan meninggalkan tanggungjawabnya.¹⁵⁵ Hal ini merupakan implikasi dari ketentuan Pasal 73 ayat (3) UNCLOS dan SEMA No. 03/BUA.6/HS/SP/XII/2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung. SEMA tersebut merupakan pedoman pelaksanaan tugas bagi pengadilan, yang menentukan bahwa terhadap terdakwa pelaku illegal fishing hanya dapat dikenakan pidana denda tanpa dijatuhi pidana kurungan sebagai pengganti. Kondisi demikian mendorong pelaku untuk tidak membayar denda terlebih pada proses penanganan perkaranya pelaku tidak dapat dilakukan penahanan.¹⁵⁶

Konsep pembangunan berkelanjutan menghendaki pelaksanaan pembangunan yang berorientasi pada kelestarian lingkungan.¹⁵⁷ UU Perikanan telah menjadikan pembangunan berkelanjutan sebagai salah satu asas dalam pengelolaan perikanan. Mengingat pembangunan berkelanjutan tersebut merupakan landasan dalam pengelolaan perikanan, maka kebijakan hukum pidana harus sinkron dan terintegrasi dengan konsep pembangunan berkelanjutan. Oleh karena itu, penelitian ini akan membahas pokok permasalahan mengenai kebijakan ideal hukum pidana dalam penanggulangan destructive fishing pada rezim pembangunan berkelanjutan.¹⁵⁸

Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas maka penulis mengangkat permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana Pengelolaan Perikanan Berkelanjutan?
2. Bagaimana 2. Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan *Destructive Fishing* Saat Ini?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum doktrinal dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan analitis, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Selanjutnya data yang diperoleh disusun secara sistematis, kemudian data

¹⁵⁵ *Ibid* hal. 3

¹⁵⁶ *Ibid* hal. 5

¹⁵⁷ Koesnadi Hardjasoemnatri, *Hukum Tata Lingkungan*, edisi ke-7 cetakan ke-17, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1999, hlm. 50.

¹⁵⁸ Pasal 2 Huruf K Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009.

dianalisis secara kualitatif dan logis serta dikaji secara komprehensif dan disajikan secara deskriptif analisis.

PEMBAHASAN

Hasil dari penelitian dan pembahasan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah hasil-hasil yang ditinjau dari segi pengetahuan ahli-ahli terhadap pandangannya terhadap kebebasan berpendapat dan kenapa kebebasan berpendapat banyak yang salah mengartikan bahwasanya bebas mengeluarkan ujaran kata-kata apapun yang menjadi bukan pendapat yang baik namun ujaran kebencian

Pengelolaan Perikanan Berkelanjutan

Pasca konferensi Bumi di Rio De Janeiro Tahun 1992 konsep pembangunan berkelanjutan menjadi populer di berbagai negara di dunia.¹³ Pembangunan berkelanjutan merupakan suatu paradigma mengenai kegiatan yang terstruktur sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan manusia dan kelestarian lingkungan tanpa mengurangi kesempatan bagi generasi mendatang.¹⁵⁹ Dewasa ini konsep pembangunan berkelanjutan semakin mengemuka ketika diperkenalkannya Sustainable Development Goal (SDGs). Di negara berkembang seperti Indonesia konsep pembangunan berkelanjutan mulai banyak dikembangkan¹⁶⁰ salah satunya di sektor perikanan. Dalam rencana strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Tahun 2020-2024, pengelolaan perikanan Indonesia dilakukan berdasarkan tiga pilar yaitu kedaulatan, keberlanjutan, dan kesejahteraan.¹⁶¹ UU Perikanan menentukan bahwa pengelolaan perikanan di wilayah pengelolaan perikanan Indonesia

Mengingat besarnya potensi perikanan Indonesia, maka konsep pembangunan berkelanjutan dapat menjadi solusi dalam pengelolaan perikanan tanpa mengganggu kelestarian lingkungan. Konsep pembangunan berkelanjutan pada umumnya terdiri dari dilakukan guna mencapai manfaat yang optimal dan berkelanjutan serta terjaminnya kelestarian sumber daya ikan. tiga domain yaitu domain ekonomi, sosial, dan ekologi.¹⁶²

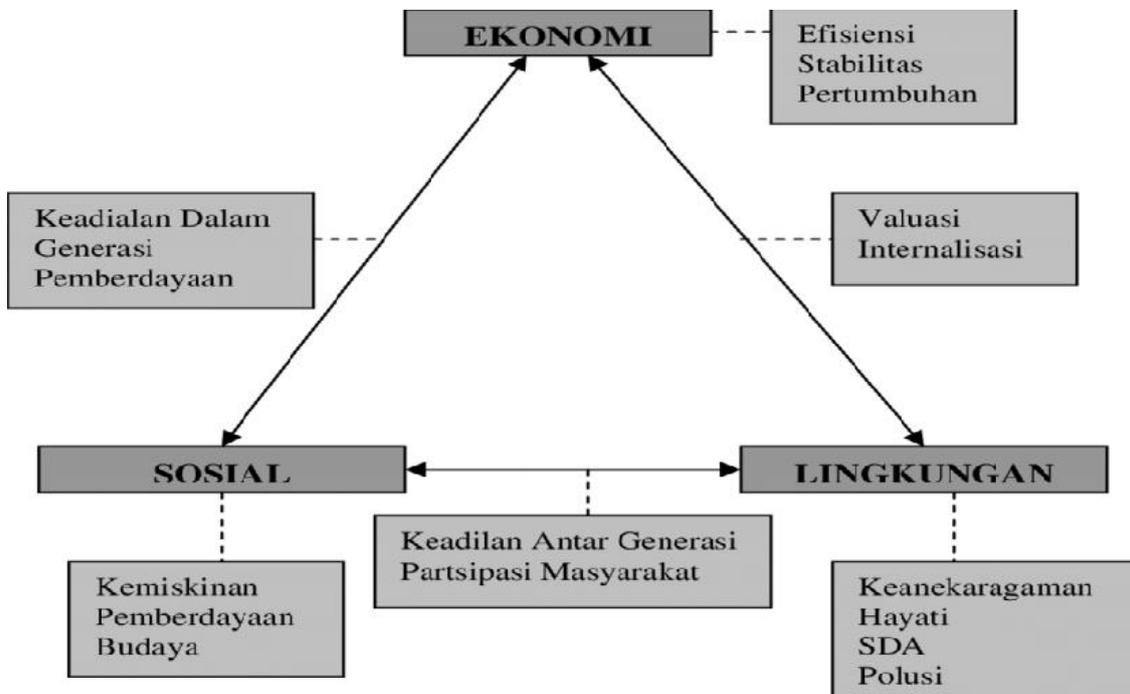
¹⁵⁹ Arif Budimanta, *Menuju Sustainable Future: Menggagas Warisan Peradaban Bagi Anak Cucu Seputar Wacana Pemikiran Surna Tjahja Djajaningrat*, Jakarta: ICSD, 2005, hlm. 7-10.

¹⁶⁰ .Roziki, "Analisis Pelaksanaan Pembangunan Berkelanjutan di Kota Batu", *Jurnal Review Politik*, Vol. 2, No. 2, Desember 2012, hlm. 221.

¹⁶¹ Direktorat Perencanaan Ruang Laut, "Sekjen KKP Pimpin Rapat Penyusunan Rancangan Teknokratik Renstra KKP 2020-2024 dan Bahan Masukan RPJMN 2020-2024", <https://kkp.go.id/djprl/prl/artikel/12691-sekjen-kkp-pimpin- Rapat-penyusunan-rancangan- teknokratik-renstra-kkp-2020-2024-dan-bahan-masukan-rpjm-2020-2024> diakses 10 Maret 2020.

¹⁶² Harry Hikmat, *Analisis Dampak Lingkungan Sosial Strategi Menuju Pembangunan Berpusat pada*

Ketiga domain tersebut menghasilkan tiga paradigma yaitu pembangunan berwawasan sosial, pembangunan berwawasan lingkungan, dan pembangunan yang berpusat pada masyarakat. Integrasi ketiga paradigma tersebut menghasilkan tiga pilar pembangunan berkelanjutan sebagaimana disajikan pada gambar 1 berikut ini:



Gambar 1. Pilar pembangunan berkelanjutan (Askary, 2003)

Guna mewujudkan pembangunan perikanan yang terkendali dan berkelanjutan, maka kebijakan hukum pidana harus sinkron dan integraldengan pembangunan berkelanjutan yakni kepentingan sosial, ekonomi, dan kelestarian sumber daya perikanan dan ekosistemnya. Berkaitan dengan hal ini, kebijakan hukum pidana mempunyai peran penting dalam pengelolaan perikanan yang berkelanjutan. Hal ini dikarenakan sanksi hukum pidana identik dengan penderitaan, sehingga diharapkan dapat melindungi potensi perikanan dan memberikan efek jera terhadap pelaku destructive fishing. Namun dalam konteks pembangunan perikanan berkelanjutan, hukum pidana tidak hanya dimaksudkan untuk

memberikan penderitaan, namun lebih mengarah sebagai sarana menyeimbangkan kepentingan ekonomi, sosial, dan lingkungan dalam proses pengelolaan perikanan.¹⁶³

Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Destructive Fishing Saat Ini

Kebijakan hukum pidana di bidang perikanan dituntut untuk dapat menegakkan hukum pidana secara konkrit, sehingga setiap pelaku yang melakukan penangkapan ikan dengan cara terlarang khususnya *destructive fishing* dapat dipidana.²⁴ Rumusan ketentuan pidana di bidang perikanan berfungsi sebagai pengendali pemanfaatan potensi perikanan dan perlindungan terhadap sumber daya perikanan dan ekosistemnya. Pada umumnya kebijakan hukum bertujuan untuk menakuti dan memberikan efek jera bagi pelaku tindak pidana di bidang perikanan khususnya *destructive fishing*. Sehingga dengan adanya kebijakan hukum pidana terhadap pelaku *destructive fishing* diharapkan mengurangi angka tindak pidana di bidang perikanan.

Kebijakan hukum pidana dalam penanggulangan *destructive fishing* saat ini dirumuskan di dalam Pasal 84 dan Pasal 85 UU Perikanan sebagaimana tabel 1 berikut ini:

No	UU No. 31 Tahun 2004		UU No. 45 Tahun 2009	
	Unsur Pasal	Sanksi	Unsur Pasal	Sanksi
1	Pasal 84 ayat (1) Setiap orang yang dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik	Pidana penjara 6 Tahun dan denda paling banyak Rp.1.200.00.000,00 (satu milyar	Pasal 85 Setiap orang yang dengan sengaja memiliki, menguasai, membawa,	Pidana penjara 5 Tahun dan denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,00

¹⁶³ Muh. Risnain, "Rekonsepsi Model Pencegahan dan Pemberantasan *Illegal Fishing* di Indonesia", *Padjajaran Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 4, No. 2, 2017, hlm. 383.

	<p>Indonesia melakukan penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1).</p>	<p>dua ratus juta rupiah).</p>	<p>dan/atau menggunakan penangkap dan/atau alat penangkap ikan yang mengganggu merusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.</p>	<p>(dua milyar rupiah).</p>
2	Pasal 84 ayat (2)	Pidana penjara 10		

<p>Nahkoda atau pemimpin kapal perikanan, ahli penangkapan ikan, dan anak buah kapal yang</p>	<p>Tahun dan denda paling banyak Rp. 1.200.00.000,00 (satu milyar dua</p>		
<p>dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak alat dan/atau cara dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2).</p>	<p>ratus juta rupiah).</p>		

3	<p>Pasal 84 ayat (3)</p> <p>Pemilik kapal perikanan, pemilik perusahaan perikanan, penanggungjawab perusahaan perikanan dan/atau operator kapal perikanan yang dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan usaha penangkapan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak alat dan/atau cara dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3).</p>	<p>Pidana penjara 10 Tahun dan denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah).</p>		
---	--	--	--	--

4	<p>Pasal 84 ayat (4) Pemilik perusahaan pembudidaya ikan, kuasa pemilik perusahaan pembudidaya ikan, dan/atau penanggungjawab perusahaan pembudidaya ikan yang dengan sengaja di</p>	<p>Pidana penjara 10 Tahun dan denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah).</p>		
	<p>wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak alat dan/atau cara dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4).</p>			

Tabel 1. Ketentuan pidana terkait *destructive fishing*

Berdasarkan tabel 1 di atas, kebijakan hukum pidana dalam penanggulangan tindak pidana destructive fishing saat ini bersifat *primum remedium*, artinya upaya pidana merupakan upaya utama dalam penanggulangan destructive fishing. UU Perikanan belum memuat sama sekali ketentuan mengenai sanksi alternatif seperti sanksi tindakan bagi pelaku *desructive fishing*. Mengingat kebijakan hukum pidana saat ini bersifat *primum remedium*, maka dalam praktiknya hakim cenderung menjatuhkan putusan berupa pembedaan baik pidana penjara maupun pidana denda terhadap pelaku destructive, salah satunya di Pengadilan Pengadilan Negeri Ranai berikut ini:

No	Nomor Perkara	Terdakwa	Sanksi
1	20/Pid.Sus-PRK/2019/PN Ran	Danh Vong Em(Vietnam)	Pidana denda sebesar Rp. 100.000.000
2	3/Pid.Sus-PRK/2018/PN Ran	Nguyen Be (Vietnam)	Pidana denda sebesar Rp. 500.000.000 subsider 4 bulan kurungan
3	8/Pid.Sus-PRK/2018/PN Ran	Tran Huu (Vietnam)	Pidana denda sebesar Rp. 500.000.000 subsider 5 bulan kurungan
4	1/Pid.Sus-PRK/2017/PN Ran	Yanto (Indonesia)	Pidana penjara selama 8 bulan dan denda sebesar Rp. 10.000.000 subsider 3 bulan kurungan
5	6/Pid.Sus-PRK/2017/PN Ran	Iwan Ferianto (Indonesia)	Pidana penjara selama 7 bulan dan denda sebesar Rp. 15.000.000 subsider 2 bulan kurungan
6	5/Pid.Sus-PRK/2017/PN Ran	Zusdaria (Indonesia)	Pidana penjara selama 7 bulan dan denda sebesar Rp. 15.000.000 subsider 2 bulan kurungan
7	4/Pid.Sus-PRK/2017/PN Ran	Joni Kusnadi (Indonesia)	Pidana penjara selama 7 bulan dan denda sebesar Rp. 15.000.000 subsider 2 bulan kurungan

			kurungan
8	2/Pid.Sus- PRK/2017/PN Ran	Kasmardi (Indonesia)	Pidana penjara selama 8 bulan dan denda sebesar Rp. 10.000.000 subsidier 3 bulan kurungan
9	3/Pid.Sus- PRK/2017/PN Ran	Dasril Efendi (Indonesia)	Pidana penjara selama 8 bulan dan denda sebesar Rp. 10.000.000 subsidier 3 bulan kurungan
10	1/Pid.Sus- PRK/2015/PN Ran	Van Thanh Son (Vietnam)	Pidana penjara selama 4 tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000 subsidier 5 bulan kurungan

Tabel 2. Tindak pidana destructive fishing di Pengadilan Negeri Ranai 2012-2019

Sumber: Direktori putusan Pengadilan Negeri Ranai

Berdasarkan tabel 2 di atas, sejak Tahun 2012 hingga Tahun 2019 terdapat 20 perkara *destructive fishing* yang diadili oleh Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Ranai. Dari 20 kasus destructive fishing tersebut, 7 kasus dilakukan oleh warga negara Vietnam, 11 kasus dilakukan oleh warga negara Indonesia, dan 2 kasus dilakukan oleh warga negara Thailand. Selanjutnya sebanyak 6 perkara destructive fishing dijatuhi sanksi pidana denda dan 14 perkara dijatuhi pidana penjara dan denda.

Kebijakan Ideal Hukum Pidana Dalam Penanggulangan *Destructive Fishing* Pada Rezim Pembangunan Berkelanjutan

Penggunaan hukum pidana dalam peraturan perundang-undangan semata-mata dimaksudkan untuk memberikan wibawa dalam proses penegakan hukumnya.¹⁶⁴ Sebagai hukum publik, hukum pidana akan berperan ketika ada benturan norma dengan kepentingan warga negara.¹⁶⁵

¹⁶⁴ Rovi Oktoza, 2015, *Kebijakan Hukum Pidana dalam Menanggulangi Kejahatan Illegal Fishing di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia*, Tesis, Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, hlm. 216.

¹⁶⁵ Syaiful Bakhari, *Hukum Pidana, Perkembangan dan Pertumbuhannya*, Yogyakarta: Total Media, 2013, hlm. 78.

Namun kebijakan kriminalisasi terhadap suatu perbuatan harus sesuai dan didukung oleh kebijakan penentuan sanksi dan kebijakan mekanisme penegakan hukumnya.

Sebagaimana pemaparan sanksi pidana dalam tabel 1 di atas, pelaku *destructive fishing* hanya dapat dijatuhi sanksi pidana baik pidana penjara maupun pidana denda. Hal ini dikarenakan UU Perikanan tidak mengatur sanksi alternatif lain bagi pelaku *destructive fishing*. Dengan demikian, kebijakan hukum pidana dalam penanggulangan *destructive fishing* saat ini bersifat *primus remedium* (sarana yang utama). Namun kebijakan hukum pidana dalam menanggulangi tindak pidana *destructive fishing* saat ini, nampaknya masih terdapat beberapa persoalan mendasar. Hal ini mengingat penggunaan sanksi pidana terhadap pelaku *destructive fishing* sulit dalam aplikasi dan eksekusinya. Penggunaan sanksi pidana penjara terhadap praktik *destructive fishing* yang terjadi di wilayah Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) hanya berlaku bagi pelaku yang berkewarganegaraan Indonesia. Sedangkan terhadap warga negara asing yang melakukan tindak pidana *destructive fishing* di wilayah ZEEI tidak dapat dikenakan pidana penjara. Penggunaan pidana penjara dalam kebijakan hukum pidana saat ini dianggap belum efektif karena hanya dapat menjerat nelayan lokal khususnya nelayan kecil dan tidak menjangkau pelaku *destructive fishing* yang berkewarganegaraan asing.¹⁶⁶

Selanjutnya kebijakan penggunaan sanksi denda juga dianggap tidak efektif walaupun nominalnya cukup besar. Hal ini dikarenakan tidak ada kebijakan yang mengatur mekanisme eksekusi terhadap pidana denda tersebut.¹⁶⁷ Kondisi ini menyebabkan tidak optimalnya eksekusi pidana denda terhadap tindak pidana *destructive fishing* khususnya yang dilakukan oleh warga negara asing di ZEEI. Mengingat penjatuhan pidana denda terhadap warga negara asing pelaku *destructive fishing* tidak dapat dibarengi dengan pidana kurungan, maka memberikan peluang kepada pelaku untuk tidak membayar denda. Sehingga denda yang tidak dibayarkan akan menjadi kerugian negara dan harus dipertanggungjawabkan oleh Kejaksaan sebagai eksekutor. Selain itu, denda yang tidak dibayarkan akan menjadi piutang negara dan menjadi tunggakan Kejaksaan dalam pelaporan PNBP.¹⁶⁸

Berdasarkan persoalan-persoalan dalam penerapan sanksi pidana tersebut, kebijakan hukum pidana dalam penanggulangan *destructive fishing* perlu menjadi perhatian, terutama dalam menciptakan kebijakan hukum pidana yang dapat menunjang pembangunan berkelanjutan.

¹⁶⁶ Maroni, *Politik Hukum Penanggulangan Kejahatan di Bidang Perikanan*, Bandar Lampung: Aura, 2019, hlm. 101.

¹⁶⁷ *Ibid*

¹⁶⁸ Tatik Sunatri, *et al*, *Optimalisasi Pelaksanaan Eksekusi Pidana Denda Dikaitkan Pasal 102 Undang - Undang Nomor 31 Tahun 2003 tentang Perikanan*, Jakarta: Miswar, 2017, hlm. 115.

Dalam rezim pembangunan berkelanjutan menekankan pada pemanfaatan sumber daya perikanan yang berwawasan lingkungan.¹⁶⁹ Berkaitan dengan berbagai masalah dalam penerapan kebijakan hukum pidana dalam penanggulangan *destructive fishing* saat ini, mengisyaratkan perlunya mengembalikan fungsi hukum pidana sebagai *ultimum remedium*. Guna mendukung terwujudnya pembangunan berkelanjutan di sektor perikanan, perlu diatur sanksi alternatif bagi pelaku *destructive fishing* yang bersifat antisipatif.¹⁷⁰ Sanksi alternatif ini dapat berupa sanksi tindakan yang mengarah pada perbaikan sosial, ekonomi, dan perbaikan terhadap kerusakan sumber daya ikan dan ekosistemnya akibat praktik *destructive fishing*. Adapun sanksi tindakan bagi pelaku *destructive fishing* yang berorientasi pada tiga pilar pembangunan berkelanjutan yakni aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan dapat berupa:

- a. Kewajiban memberikan kompensasi kepada nelayan lokal yang dirugikan akibat praktik *destructive fishing*;
- b. Bagi nelayan asing yang mempunyai kompetensi di bidang penangkapan ikan, diwajibkan untuk melakukan pelatihan kepada nelayan lokal khususnya nelayan kecil dalam jangka waktu tertentu;
- c. Kewajiban melakukan perbaikan atas kerusakan sumber daya perikanan dan ekosistemnya; dan
- d. Kewajiban melakukan pekerjaan secara sukarela dalam rangka memulihkan kerusakan sumber daya perikanan dan ekosistemnya;

Penerapan sanksi tindakan terhadap pelaku *destructive fishing* lebih bersifat restoratif dan mendidik sehingga dapat mengurangi degradasi sumber daya perikanan dan lingkungan. Dengan demikian dapat terwujudnya keseimbangan antara pemanfaatan sumber daya ikan dan pembangunan berkelanjutan.¹⁷¹ Selain dapat menunjang pembangunan perikanan secara terkendali dan berkelanjutan, penerapan sanksi tindakan dalam penanggulangan *destructive fishing* diperlukan guna menciptakan kepastian hukum dan keadilan khususnya bagi nelayan kecil di masa mendatang.

¹⁶⁹ Muhar Junef, "Pengekan Hukum dalam Rangka Penataan Ruang Guna Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan", *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, Vol. 17, No. 4, Desember 2017, hlm. 388.

¹⁷⁰ M. Sholehuddin, *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana*, Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2004, hlm. 17.

¹⁷¹ Ayu Izza Elvany, "Kebijakan Formulatif Penanggulangan Tindak Pidana *Destructive Fishing* di Indonesia", *Justitia Jurnal Hukum*, Vol. 3, No. 2, Oktober 2019, hlm. 230.

PENUTUP

Kebijakan hukum pidana dalam penanggulangan *destructive fishing* saat ini bersifat *primum remedium* (sarana yang utama). Hal ini dikarenakan UU Perikanan hanya mengatur sanksi pidana berupa pidana penjara dan pidana denda bagi pelaku *destructive fishing*. Namun dalam perkembangannya, kebijakan hukum pidana dalam menanggulangi tindak pidana *destructive fishing* mengalami berbagai hambatan dalam hal penerapannya dan belum mendukung pembangunan berkelanjutan. Oleh karena itu guna menunjang pembangunan berkelanjutan, diperlukan kebijakan hukum pidana yang bersifat restoratif, antisipatif dan mendidik dengan mengatur sanksi tindakan bagi pelaku *destructive fishing*. Sanksi tindakan ini mengarah pada perbaikan sosial, ekonomi, dan perbaikan terhadap kerusakan sumber daya ikan dan ekosistemnya akibat praktik *destructive fishing*. Dengan demikian keseimbangan antara pemanfaatan sumber daya ikan dan pembangunan berkelanjutan dapat terwujud.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Koesnadi Hardjasoemnatri, *Hukum Tata Lingkungan*, edisi ke-7 cetakan ke-17, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1999
- Maroni, *Politik Hukum Penanggulangan Kejahatan di Bidang Perikanan*, Bandar Lampung: Aura, 2019
- Syaiful Bakhari, *Hukum Pidana, Perkembangan dan Pertumbuhannya*, Yogyakarta: Total Media, 2013

Jurnal

- Arif Budimanta, *Menuju Sustainable Future: Menggagas Warisan Peradaban Bagi Anak Cucu Seputar Wacana Pemikiran Surna Tjahja Djajaningrat*, Jakarta: ICSD, 2005, hlm. 7-10.
- Ayu Izza Elvany, “Kebijakan Formulatif Penanggulangan Tindak Pidana *Destructive Fishing* di Indonesia”, *Justitia Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 3, No. 2, Oktober 2019, hlm. 212.
- Blake D. Ratner, “Fishing for Justice: Human Rights, Development, and Fisheries Sector Reform”, *Global Environmental Change*, Vol. 27, 2014, hlm. 121.
- CEA, *Trend in Marine Resources and Fisheries Management in Indonesia*, California: California Environmental Associates, 2018, hlm. 9.
- Direktorat Perencanaan Ruang Laut, “Sekjen KKP Pimpin Rapat Penyusunan Rancangan Teknokratik Renstra KKP 2020-2024 dan Bahan Masukan RPJM 2020-2024”, <https://kkp.go.id/djprl/prl/artikel/12691-sekjen-kkp-pimpin-rapat-penyusunan-rancangan-teknokratik-renstra-kkp-2020-2024-dan-bahan-masukan> rpjmn-2020-2024 diakses 10 Maret 2020.
- Hari Eko Irianto, *et al*, “Dukungan Teknologi Penyediaan Produk Perikanan”, *Makalah, Seminar Nasional Hari Pangan Sedunia 2007 di Auditorium II Kampus Penelitian Pertanian Cimanggu*, Bogor, 21 November 2007, hlm.1

- Harry Hikmat, *Analisis Dampak Lingkungan Sosial Strategi Menuju Pembangunan Berpusat pada Rakyat*, Pascasarjana Manajemen Pembangunan Sosial Universitas Indonesia, Jakarta, 2000.
- Maroni, *Politik Hukum Penanggulangan Kejahatan di Bidang Perikanan*, Bandar Lampung: AURA, 2019,
- Muh. Risnain, “Rekonsepsi Model Pencegahan dan Pemberantasan *Illegal Fishing* di Indonesia”, *Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 4, No. 2, 2017.
- Rovi Oktoza, 2015, *Kebijakan Hukum Pidana dalam Menanggulangi Kejahatan Illegal Fishing di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia*, Tesis, Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta
- Roziki, “Analisis Pelaksanaan Pembangunan Berkelanjutan di Kota Batu”, *Jurnal Review Politik*, Vol. 2, No. 2, Desember 2012
- Tatik Sunatri, *et al*, *Optimalisasi Pelaksanaan Eksekusi Pidana Denda Dikaitkan Pasal 102 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2003 tentang Perikanan*, Jakarta: Miswar, 2017,

Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009.